

# IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGANGGARAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PROVINSI ACEH

Jemarin<sup>1</sup>, Cut Zahri Harun<sup>2</sup>, Niswanto<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2,3)</sup> Prodi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 23111, Indonesia

Email: Jemarin.1209200050017@gmail.com, Cut\_Zahri@yahoo.com, Niswanto@fkip.unsyiah.ac.id

**Abstract:** *The purpose of this research is to find out and describe the management of budgeting performed by the House of Representatives of Aceh (DPRA) and working Unit of Aceh Government (SKPA). This reseach used qualitative approach with descriptive method. This research was conducted at the administrative office of the House of Representative of Aceh (DPRA). The subjects of this research were the DPRA's speaker, the four deputies of DPRA, the commussion of budget, and the secretary of DPRA. The results revealed that (1) budgeting management planning is conducted by the budget team of Aceh Government at the end of the year through coordination meetings by preparing budget document; (2) the budget process is performed through coordination meeting by discussing the plans of badget usage and budget Absorption of Aceh Provincial Budget (APBA) in the previous yeas, and making an accurate estimate; (3) the performance of DPRA in terms of budgeting has been in line with the procedure stated within the minutes through the mechanism of special committee; (4) the supervision and evaluation performed by DPRA involve all stakeholders and also expert staff the Aceh Government.*

**Keywords:** *Management and Budgeting*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen anggaran yang dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan pada kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan subjek penelitian: Ketua DPRA, Wakil Ketua DPRA, Komisi C yang membidangi Anggaran, dan Sekretaris Dewan (SETWAN) provinsi Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan program penganggaran dilakukan pada akhir tahun melalui rapat koordinasi dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh dengan mempersiapkan dokumen-dokumen anggaran, (2) Proses anggaran dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan membahas rancangan penggunaan anggaran dan daya serap APBA tahun sebelumnya serta melakukan penaksiran atau estimasi secara lebih akurat, (3) Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam hal penganggaran sudah sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam berita acara melalui mekanisme Panitia Khusus (PANSUS), (4) Pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melibatkan berbagai pihak atau *stakeholder* dan juga staf ahli dari Pemerintah Aceh.

**Kata kunci :** Manajemen dan Penganggaran.

## PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang salah satu fungsinya adalah berhubungan

dengan anggaran. Fungsi DPRA sebagai elemen berperan untuk membentuk peraturan daerah atau disebut sebagai hak legislasi, selanjutnya dalam bidang anggaran DPRA juga mempunyai wewenang dalam membahas serta mengesahkan dan menetapkan anggaran. Selain

itu, DPRA mempunyai fungsi pengawasan untuk mengontrol pelaksanaan penganggaran sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dengan adanya ini, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, yang dapat merugikan negara.

Dalam hal ini, peran dan fungsi anggota legislatif di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh membutuhkan sebuah konsep manajemen dalam proses penganggaran secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen merupakan salah satu komponen yang tidak dapat diabaikan. Karena fungsi manajemen merupakan hal yang melekat dengan manusia dan tidak terkecuali dengan dunia kerja.

Salah satu fungsi manajemen yang diaplikasikan oleh anggota dewan di kantor DPRA meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakkan/pemimpinan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Kegiatan di atas merupakan rangkaian proses yang hampir selalu dilalui dalam setiap langkah pengambilan keputusan.

Namun, dalam kenyataannya kadang kala pelaksanaan manajemen yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh masih belum berjalan secara maksimal, sehingga masih jauh dari sebuah kesempurnaan yang diharapkan oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul tesis "Implementasi Manajemen Penganggaran Oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh".

## **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### ***Pengertian Manajemen***

Manajemen adalah hal yang dilakukan oleh seorang manajer. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* dengan kata dasar *to manage* yang berarti mengelola. Manajemen adalah proses yang menentukan pengambilan keputusan terbaik mengenai bentuk sumber daya bisnis yang akan digunakan untuk memproduksi barang atau layanan jasa. Termasuk di dalam sumber daya bisnis antara lain pekerja, lahan, dan dana produksi. Manajemen juga merupakan suatu bentuk kerja yang mengikutsertakan pengkoordinasian sumber daya organisasi untuk memenuhi tujuan organisasional.

Hasibuan (2007:41) mengemukakan bahwa "Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan daripada usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber lain dari kegiatan tersebut agar supaya dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan". Dengan kata lain, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah "*managing*" Pengelolaan, sedang pelaksanaanya disebut manager atau pengelola. Manajemen merupakan hal penting yang harus ada dan

diterapkan disetiap segi dan lini kehidupan baik itu kehidupan pribadi, organisasi, sosial kemasyarakatan, dengan adanya manajemen semua akan teratur dan hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Andrew F. Sikula (Siswanto, 2012:2) bahwa:

*“Management is general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, and decision making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service”.*

G.R. Terry (Siswanto, 2012:2), *Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources”.* Pendapat di atas juga memberikan pengertian bahwa manajemen adalah hal yang dilakukan oleh manajer yang melibatkan aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Manajemen merupakan hal yang harus diterapkan manusia dalam kehidupan sehari-hari karena manajemen merupakan sebuah keahlian dalam menempuh dan mendapatkan kesuksesan.

### **Manajemen Penganggaran**

Dalam ketentuan Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan pengertian keuangan negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003). Siegel (2008:4) mengemukakan “anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan”. Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam proses penganggaran, anggaran perlu mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode yang dianggarkan. Ada beberapa ahli yang telah mengemukakan definisi anggaran, antara lain: Glend A Welsch (Siegel, 2008:5), mengemukakan bahwa *“Profit planning and control may be broadly as de fined as sistematic and formalized approach for accomplishing the planning, coordinating and control responsibility of management”.* Dengan kata lain, anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Jadi, apabila anggaran dihubungkan dengan fungsi dasar manajemen, maka anggaran meliputi fungsi perencanaan, mengarahkan, mengorganisasikan dan mengawasi setiap satuan dan bidang-bidang organisasional didalam badan usaha. Secara konseptual, penganggaran atau pembiayaan yang dilaksanakan oleh fungsi legislator harus mengacu pada ketentuan Permen No. 27 Tahun 2013, lebih rincinya penganggaran

membutuhkan kebijakan dari pemegang wewenang. Adapun kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

### ***Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat***

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.

Hasibuan (2008:94) memberikan definisi bahwa "Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu".

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Kantor di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang beralamat di Jalan Tgk Daud Beureueh. Sedangkan waktu penelitian dilakukan sejak bulan Mei s/d Juli 2014. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **HASIL PEMBAHASAN**

### ***Persiapan Badan Anggaran dalam proses penganggaran***

Dalam hal ini badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh beserta seluruh anggota terlibat secara aktif dalam menentukan dan membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA). Dalam pembahasan anggaran baik Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) maupun Rencana Kerja Anggaran pemerintah aceh dan Pendapatan Belanja Aceh (RKA-APBA) bukan semata-mata dibahas oleh badan anggaran saja, akan tetapi boleh saja dibahas oleh komisi-komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Setiap anggaran yang telah dirumuskan dan disusun, selanjutnya dibawa ke Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menentukan pembahasan selanjutnya. Menurut penjelasan dari Sekretaris Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (BANGGAR DPRA), bahwa: Persiapan Badan Anggaran dalam hal proses penganggaran, badan anggaran DPRA perlu memperhatikan beberapa mekanisme atau tahapan jadwal dalam proses penyusunan RKPA dilaksanakan paling lambat bulan mei, dan pada minggu pertama bulan juni, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris aceh selaku ketua TAPA kepada Gubernur.

Pada pertengahan bulan juni, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Gubernur kepada DPRA untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBA tahun

anggaran berikutnya. Pada akhir juli, rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas disepakati menjadi KUA dan PPAS, minggu ke dua pada bulan juli Pejabat Pengelola Kekayaan Aceh (PPKA) menyusun laporan realisasi semester pertama APBA dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPA dan disampaikan kepada sekretaris aceh selaku koordinator pengelola keuangan aceh.

Pada minggu ke tiga bulan juli, laporan realisasi semester pertama APBA dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBA dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Pada akhir juli, laporan realisasi semester pertama APBA dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRA. Selanjutnya, pada awal agustus surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPA dan RKA-PPKA diterbitkan, dan minggu pertama bulan agustus dibuat rancangan kebijakan umum perubahan APBA dan PPAS perubahan APBA dan disampaikan kepada DPRA. Sedangkan, pada minggu ke dua bulan agustus kegiatan selanjutnya adalah, membuat rancangan kebijakan perubahan APBA dan PPAS perubahan APBA, setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBA serta PPAS perubahan APBA. Pada minggu ke tiga bulan agustus, membuat pedoman penyusunan RKA-SKPA dan/atau kriteria DPA-SKPA yang dapat diubah, diterbitkan oleh Gubernur. Pada

minggu ke dua bulan September, Gubernur menyampaikan rancangan qanun tentang perubahan APBA, beserta lampirannya kepada DPRA untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan akhir September dibuat persetujuan DPRA terhadap rancangan qanun tentang perubahan APBA. Sedangkan pada minggu pertama bulan Oktober, Gubernur menyampaikan rancangan qanun tentang APBA beserta lampirannya kepada DPRA untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan terakhir yaitu pada pertengahan desember, mengesahkan kembali DPA-SKPA menjadi DPAL-SKPA untuk kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, yang didanai dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), tahun sebelumnya SKPA menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada Pejabat Pengelola Kekayaan Aceh (PPKA).

Dalam hal penyusunan rancangan APBA, Pemerintah Aceh terlebih dahulu menyusun RKPA yang merupakan penjabaran dari RPJM Aceh. Dengan menggunakan bahan dari Renja SKPA untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mengacu kepada rencana kerja pemerintah, RKPA disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPA diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan mei tahun anggaran sebelumnya, RKPA ditetapkan dengan peraturan Gubernur, peraturan Gubernur tentang RKPA disampaikan kepada DPRA sebagai dasar pembahasan rencana KUA dan rancangan PPAS. Dalam

penetapan APBA, perlu dilakukan penyampaian dan pembahasan rancangan qanun tentang APBA, mengadakan evaluasi rancangan qanun tentang APBA dan membuat rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA.

***Kinerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Penyusunan Anggaran***

Berdasarkan perhitungan perolehan pendapatan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diatur dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Maka secara teknis penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja harus mengikuti mekanisme yang memadukan antara perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, pendekatan penganggaran terpadu, dan pendekatan prestasi kerja. Pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Badan Anggran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, pada dasarnya berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan dan mekanisme penganggaran (budgeting) yang berlaku sehingga menjadi kinerja yang optimal dan pencapaian hasilnya sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Meskipun pada penerapannya diperlukan sebuah standarisasi sebagai tolak ukur proses pencapaian anggaran. Dalam pembahasan proses penyusunan anggaran disajikan secara runtut dan terinci serta diharapkan pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan kinerja. Anggaran sebagai salah satu alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*),

dimana anggaran tersebut merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efesiensi pelaksanaan anggaran.

***Proses dan Implementasi Penganggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh***

Hasil pembahasan dan penetapan anggaran tidak terdapat hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi kebijakan keuangan daerah. Selain dari itu juga hak inisiatif tentang pembuatan peraturan daerah yang berhubungan dengan Qanun yang ditetapkan oleh DPRA sejak tahun 2009-2013, dimana dari sekian peraturan daerah, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia atau kualitas anggota DPRA sangat mempuni dan mampu dalam merumuskan, membahas dan menyusun rancangan peraturan daerah. dan hal ini tentu menjadi harapan besar dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi anggaran. Dalam perencanaan dan perumusan anggaran harus mengikuti langkah-langkah dan mekanisme yang berlaku dan juga penentuan kebijakan anggaran harus mengacu kepada anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat di atas, Herlianto (2011:65) mengemukakan bahwa:

“Ada beberapa langkah yang harus diikuti dalam proses penganggaran, antara lain: 1) penetapan tujuan; 2) pengevaluasian sumber-sumber daya yang tersedia; 3) negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat

mengenai angka-angka anggaran; 4) pengorganisasian dan peninjauan komponen; 5) persetujuan akhir; dan 6) pendistribusian anggaran yang disetujui”.

Berdasarkan hasil reduksi data dapat disimpulkan bahwa: rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berdasarkan prestasi kerja (kinerja) tahun sebelumnya. Kemudian, disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya yaitu periode setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Sebuah rencana kerja uang sudah disusun oleh pemerintah Aceh membutuhkan dokumen awal perencanaan dari para pimpinan instansi atau dinas terkait. Dokumen tersebut diajukan ke departemen keuangan untuk diolah menjadi satu paket kebijakan fiskal dan akan dibahas oleh presiden bersama para menteri dalam sidang kabinet yang akan melahirkan penetapan pagu APBD atau APBA.

Penjelasan di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Modjo (2011:6), yaitu: setelah APBA ditetapkan, memasuki tanggal 1 Januari merupakan periode pelaksanaan anggaran”. Pelaksanaan anggaran yang telah disetujui akan disahkan oleh menteri Keuangan yang disampaikan kepada kuasa bendahara umum negara berdasarkan Undang-undang R.I No. 17/2003 tentang keuangan Negara (pasal 14 ayat 1-5).

#### ***Pengawasan Anggaran Yang Dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh***

Ada beberapa tahapan Proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRA terhadap penggunaan anggaran yakni dengan

pengawasan langsung pada objek anggaran dilapangan melalui mekanisme panitia khusus (PANSUS). Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRA adalah pengawasan politik anggaran, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Melalui fungsi pengawasan dewan, berkenaan dengan pemerintah sebagai pengguna dan pelaksana kebijakan anggaran dapat terhindar dari berbagai tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan anggaran.

Dari hasil pengawasan dewan akan dilakukan sebuah tindakan penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana pengelolaan birokrasi pemerintah daerah dengan tanpa mereka sadari dapat bermuara pada terjadinya indikasi tindak pidana korupsi bagi pejabat publik yang menangani urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRA akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua komisi C, juga membenarkan apa yang disampaikan oleh wakil ketua di atas, yaitu fungsi pengawasan penggunaan dan realisasi anggaran meliputi laporan realisasi APBA, neraca, laporan arus kas, dan catatan

atas laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan disampaikan kepada publik melalui DPRA dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap pengguna anggaran diharapkan dapat memberikan akuntabilitas keuangan semakin baik dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam rangka mensejahterakan rakyat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Proses persiapan dan pembahasan anggarannya dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRA dan TAPA melalui pengumpulan dokumen-dokumen anggaran berdasarkan jadwal perumusan dan pembahasan tata tertib DPRA Provinsi Aceh.
2. Proses anggaran dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan membahas rancangan penggunaan anggaran dan daya serap APBA tahun sebelumnya dan melakukan penaksiran atau estimasi secara lebih akurat.
3. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam hal penganggaran sudah sesuai dengan mekanisme yang tertera dalam berita acara melalui mekanisme Panitia Khusus (PANSUS).
4. Pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh melibatkan berbagai pihak atau *stakeholder* dan juga staf ahli dari Pemerintah Aceh.

### Saran

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi legislatif, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan melibatkan secara aktif partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan penyusunan Program anggaran maupun implementasinya, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan memaksimalkan anggaran aspirasi rakyat melalui pemberdayaan masyarakat dengan harapan program yang dibuat lebih menyentuh kepada rakyat.
2. Dalam rangka penguatan peran DPRA di bidang pengawasan anggaran, sebaiknya anggota DPRA secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, konsepsional dan operasional, sehingga pengawasan anggaran dan pendapatan belanja daerah dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan harapan masyarakat.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hasibuan, H. dan Malayu S.P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlianto, D., 2011. *Teknik Penyusunan Anggaran Operasional Perusahaan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Siegel Joel. G & Jae K. Shim. 2008. *Budgeting (Pedoman Lengkap Langkah-langkah Penganggaran)*. Jakarta: Erlangga.
- Siswanto, H.B., 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia, Nomor 27 Tahun 2013, ***Tentang,  
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan  
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.***  
*Jakarta.*

Undang-Undang R.I No. 17/2003 tentang Keuangan  
Negara

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah